BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global yang ketat dan terbuka dengan dinamika perubahan yang begitu cepat. Dalam kompetisi global seperti ini, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*) menjadi suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan tentu saja *profitable*, berkelanjutan serta memiliki daya saing yang kuat. Seorang investor akan mau menanamkan modalnya di suatu perusahaan, salah satu indikatornya adalah apakah perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* secara baik dan konsisten atau tidak. Dengan demikian implementasi prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan.

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance*, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diimplementasikannya prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance*.¹ Skandal yang terjadi di Amerika Serikat dengan adanya kasus Enron Corp. dan Worldcom maupun beberapa kasus-kasus di negara berkembang seperti di

¹ <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.22 WIB.

Indonesia dengan kasus Kimia Farma dan Bank Global, kian menambah perhatian para pelaku pasar dan penentu regulasi terhadap isu *Good Corporate Governance*. Para pelaku usaha dituntut untuk mengubah cara mereka melakukan dan mengelola bisnis mereka. Ditambah lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan semakin kompetitif, maka perubahan fundamental dalam penerapan *Corporate Governance* mutlak dilakukan. (Herwidayatmo, 2000).²

Begitu pula dengan krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan, salah satunya disebabkan oleh lemahnya implementasi *Good Governance* baik itu di pemerintahan, perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan (*Bad Governance*) pada waktu itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Sejak itulah *Good Corporate Governance* menjadi wacana yang mengemuka di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk keluar dari krisis multidimensi yang mendera Indonesia.

Lemahnya implelementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia ditunjukkan dengan berbagai hasil survei dan penelitian. Tahun 1998, secara umum hasil survey Booz-Allen dan Hamilton bahwa belum efektifnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur (2,88) dibandingkan dengan Malaysia (7,72), Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan Jepang (9,17). Asian Development Bank (ADB) juga mengemukakan bahwa fenomena yang sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan di Indonesia antara

² <http://www.syair79.wordpress.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.25 WIB.

lain belum melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional, karena konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya afiliasi antar pemilik, pengawas dan pengelola perusahaan, serta tidak berfungsinya dewan komisaris perusahaan.³

Tahun 1999, di sektor swasta menurut hasil riset McKinsey & Company yang melibatkan para investor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sedangkan menurut hasil survey PERC terhadap pelaku bisnis asing di Asia ternyata Indonesia merupakan negara terburuk di bidang *Corporate Governance*.⁴ Tabel 1 (satu) di bawah ini menunjukkan peringkat *Good Governance* di Asia :

Tabel 1
Skor Peringkat *Good Governance* di Asia

Negara	Skor
Singapura	2,00
Hongkong	3,59
Jepang	4,00
Philipina	5,00
Taiwan	6,10
Malaysia	6,20
Thailand	6,67
Cina	8,22
Indonesia	8,29
Korea Selatan	8,83
Vietnam	8,89

Keterangan : Makin tinggi skor, makin buruk *Good Governance*

Sumber : *Media Akuntansi*, No 17/TH. VII/April-Mei 2001

³ H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Tahun 2001, hasil survei yang dikembangkan oleh *Credit Lyonnais Securities* (CLSA) dengan tujuh kategori, meliputi disiplin, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kesadaran nasional terhadap standar *Good Corporate Governance* pada 115 perusahaan di 25 negara berkembang menunjukkan bahwa skor total untuk perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya 37,7 dari skala 0-100 (100 adalah tertinggi). Skor ini lebih rendah dibandingkan dengan skor total perusahaan yang disurvei di negara Singapura (64,5), Malaysia (56,6), India (55,6), Thailand (55,1), Taiwan (54,6), Cina (49,1), Korea (47,1), dan Philipina (43,9).⁵

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* dan implementasinya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Upaya-upaya tersebut antara lain pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) oleh kantor Menko Perekonomian dan disusunnya *National Code of Good Corporate Governance* atau Pedoman Nasional *Good Corporate Governance*. Lembaga pemeringkat *Corporate Governance* seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) juga turut mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.⁶

Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama dikeluarkan pada tahun 1999 oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2006.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁶ <http://www.syair79.wordpress.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.25 WIB.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia dan Pedoman Perasuransian Indonesia juga dikeluarkan oleh komite ini pada tahun 2004 dan 2006.

Berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut belumlah mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003) yang menemukan bahwa *Good Corporate Governance* belum berhasil diterapkan di Indonesia. Hal menarik lainnya ditemukan oleh Bank Indonesia. Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September 2007, menemukan bahwa 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *Good Corporate Governance* (Muchammad Ghufro, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada perubahan yang berarti atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk dibidang perbankan.⁷

Sebagaimana dipahami secara luas, *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).⁸ *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholders* lainnya.⁹ Dalam arti sempit dapat dikatakan

⁷ <http://syair79.wordpress.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 pukul 20.25 WIB

⁸ Zarkasyi, *op.cit.*, hlm. 7.

⁹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87 dalam Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2007), hlm. 60.

Good Corporate Governance mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Juga hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, hingga dewan komisaris. Ia juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor kreditur dan calon kreditur perseroan.¹⁰

Implementasi prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* merupakan cermin keamanan suatu perusahaan. Didalamnya memuat pengelolaan informasi secara bersih, transparan, dan profesional. Secara internal, hal tersebut akan membantu perusahaan mengelola aset dan transaksinya secara efektif dan efisien. Sementara itu, proses keterbukaan yang dianut merupakan

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, "Peranan Fungsi Kepengawasan Bagi Pelaksana *Good Corporate Governance*", *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, R.M. Talib Puspokusumo, ed, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 2 dalam Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2007), hlm. 70.

gambaran kinerja perusahaan secara riil sehingga menekan keraguan publik.¹¹ Dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) baik bagi perseroan, para pemegang saham, maupun *stakeholders* yang lain.

Salah satu upaya dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* dalam perseroan terbatas dapat dilakukan dengan cara membentuk komisaris independen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas dalam anggaran dasarnya dapat mengatur adanya komisaris independen dalam perseroannya tersebut. Lebih lanjut Pasal 120 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa komisaris independen tersebut diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dipilih dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang lain.

Pedoman tentang komisaris independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat pula dipahami sebagai komisaris yang bukan merupakan

¹¹ Harian *KOMPAS*, "Tata Kelola Perusahaan Baik, Daya Tawar Naik", 8 Oktober 2006.

anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.¹² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan, terutama perusahaan publik.

Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) juga menegaskan bahwa pembentukan komisaris independen bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen juga diharapkan mampu mendorong implementasi prinsip-prinsip pokok dan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan di Indonesia.

Data menunjukkan dalam praktek belum semua perseroan terbatas di Indonesia memiliki komisaris independen, masih ada perseroan terbatas yang belum memiliki komisaris independen. Berdasarkan informasi pihak otoritas bursa

¹² Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 135.

sampai dengan awal 2008 dari 272 perusahaan tercatat, ternyata baru 86% (240 emiten) yang telah memiliki komisaris independen dan sisanya masih terdapat 32 (14%) emiten belum memiliki komisaris independen. Bank Indonesia (BI) juga telah melakukan uji coba penerapan *Good Corporate Governance* pada periode September 2007 terhadap 101 bank di Indonesia (termasuk kantor cabang bank asing) ternyata hasilnya hanya 30,7% yang memenuhi ketentuan lima pasal utama. Salah satu penyebab belum terpenuhinya *Good Corporate Governance*, adalah sebanyak 53,5% bank ternyata belum memiliki komisaris independen.¹³

Disamping belum semua perseroan terbatas menempatkan komisaris independen dalam jajaran dewan komisarisnya, praktek di Indonesia sering kali peran komisaris mewakili pemegang saham mayoritas atau bahkan pemegang saham mayoritas itu sendiri. Hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa dewan komisaris berpotensi untuk mengintervensi direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan perusahaan sehingga berakibat menimbulkan benturan kepentingan antar organ perseroan terbatas itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi bukan berperan dalam pengelolaan perseroan sebagaimana yang menjadi tugas direksi. Hal ditegaskan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan pada umumnya, baik

¹³ <http://www.epajak.org>, diakses pada tanggal 19 Juli 2009 pukul 13.00 WIB.

mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Terdapat beberapa kendala lain yang cukup menghambat kinerja komisaris independen. Biasanya kedudukan direksi terlalu kuat, bahkan terdapat beberapa direksi perusahaan publik yang enggan membagi wewenang, serta tidak memberikan informasi yang cukup kepada dewan komisaris, terutama komisaris independen.¹⁴ Hal ini tentu saja berakibat fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang menjadi tugas dan tanggung jawab pokok dewan komisaris tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal mengingat informasi yang didapatkan dari direksi seputar pengelolaan perseroan sangat terbatas. Komisaris independen pun masih lemah dalam hal kompetensi dan integritasnya. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas rasa penghargaan semata, ataupun kenalan dekat. Padahal kompetensi, integritas, kapabilitas, serta independensi komisaris independen adalah hal yang sangat fundamental sifatnya agar tercapai *Good Corporate Governance*. Eksistensi komisaris independen di perusahaan publik termasuk perbankan seharusnya tidak hanya sekadar pajangan dan pelengkap saja tetapi diharapkan sebagai wujud implementasi *Good Corporate Governance*.

Berbagai fakta ini belumlah dapat memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan pembentukan komisaris independen dalam perseroan terbatas di Indonesia telah sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal pembentukan komisaris independen yaitu sebagai pendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan

¹⁴ <http://www.epajak.org>, diakses pada tanggal 19 Juli 2009 pukul 13.00 WIB.

menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris disamping itu juga sebagai pendorong implementasi prinsip-prinsip pokok dan praktek *Good Corporate Governance*.

Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas yang benar-benar independen dan terbebas dari segala bentuk afiliasi baik itu dengan pemegang saham utama, direksi maupun dengan dewan komisaris lainnya serta mempunyai kompetensi, integritas serta kapabilitas yang kuat akan mendorong implementasi prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* dalam perseroan terbatas. Dengan alasan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Komisaris Independen dalam Implementasi *Good Corporate Governance* - Studi Kasus Pada PT. Bank Permata Tbk.**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan komisaris independen dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan?
2. Apakah diadakannya komisaris independen memberikan kontribusi positif pada kinerja PT. Bank Permata Tbk.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan komisaris independen dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah dengan diadakannya komisaris independen di PT. Bank Permata Tbk. memberikan kontribusi positif terhadap kinerja PT. Bank Permata Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum ekonomi dan bisnis serta ilmu hukum perusahaan pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pengajar hukum ekonomi dan bisnis di Fakultas Hukum, praktisi hukum terutama konsultan hukum perusahaan dan *corporate lawyer*, para pelaku usaha, para *shareholders*, para *stakeholders*, regulator, pengambil kebijakan serta mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal mewujudkan *Good Corporate Governance*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Peranan Komisaris Independen dalam Implementasi *Good Corporate Governance* – Studi Kasus Pada PT. Bank Permata Tbk.” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Penulisan Hukum/Skripsi ini memerlukan suatu batasan konsep untuk memberikan batasan mengenai beberapa pengertian dari beberapa pendapat yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain ; tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

2. Komisaris Independen

Bab II butir 6 (enam) Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menegaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

¹⁵ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Reality Publisher, 2008), hlm. 508.

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

3. Implementasi

Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹⁶

4. *Good Corporate Governance*

Bab II butir 3 (tiga) Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menegaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku.

5. *Corporate Governance*

Adalah peranan dan perilaku dari Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.¹⁷

6. *Good Governance*

Menurut LAN dan BPKP *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society).¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 299.

¹⁷ <http://www.iicg.org>, diakses pada tanggal 14 Desember 2009 pukul 22.00 WIB.

¹⁸ <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 14 Desember 2009 pukul 22.00 WIB.

7. Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

8. Perseroan Terbatas

Pasal 1 butir 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa yang dimaksud perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.

9. Bank

Pasal 1 butir 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengadakan studi kasus. Penelitian hukum normatif

dilaksanakan dengan cara melakukan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, regulasi, putusan pengadilan serta bahan hukum kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kasus dilaksanakan dengan memfokuskan penelitian pada permasalahan hukum sesuai dengan objek penelitian yang terjadi pada satu institusi/kelembagaan saja yaitu dengan melakukan analisa terhadap data-data yang didapatkan di lapangan baik data berupa hasil wawancara maupun data berupa dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari nara sumber.

2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, serta regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- 7) Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 8) Peraturan Nomor IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
- 9) Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

10) Surat edaran PT. Bursa Efek Jakarta Nomor SE-005/BEJ/09-2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Komisaris Independen.

11) Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

12) Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada bulan Januari 2004.

13) Pedoman Tentang Komisaris Independen yang disusun oleh *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal dan artikel baik yang diperoleh dari media massa cetak maupun elektronik, serta data-data yang didapatkan di lapangan baik data yang berupa hasil wawancara, maupun data yang berupa dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari nara sumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan objek

penelitian dalam tataran teroris yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, regulasi, putusan pengadilan serta bahan hukum kepustakaan lainnya yang berupa buku-buku literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal serta artikel baik yang diperoleh dari media massa cetak maupun elektronik.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian dalam tataran praktis dengan menggunakan metode wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber serta pengumpulan data berupa dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang juga diperoleh dari nara sumber.

4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah PT. Bank Permata Tbk. yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Samsul Huda Aditya yang bertindak sebagai *Corporate Governance Assurance - Corporate Secretary Group* PT. Bank Permata Tbk.

5. Metode Analisis

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu pola berpikir dengan bertitik tolak pada suatu fakta atau peristiwa yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.